BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Kondisi dan Penanganan Pekerja Seks komersial Anak oleh Pemerintahan India

4.1.1 Kondisi Pekerja Seks Komersial Anak di India

Pekerja anak bukan fenomena baru hal ini ada dalam satu bentuk atau yang lain dalam semua periode sejarah. Apa yang baru namun, persepsi sebagai masalah sosial dan menjadi keprihatinan sosial. Masalah pekerja anak adalah multi-dimensi satu sebagai anak dari segmen besar dari total penduduk. Anak prostitusi yang melibatkan kedua anak laki-laki dan perempuan sangat umum sekarang ini tapi pelacuran anak perempuan lebih umum daripada prostitusi anak laki-laki.

Jutaan anak-anak di dunia sekarang ini menjalani bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak-anak yang mencakup anak perbudakan, prostitusi anak, perdagangan anak, tentara anak. Di era modern material dan kemajuna teknologi, anak-anak hampir disetiap negara yang sedang kejam dieksploitasi.

India memiliki perbedaan meragukan menjadi bangsa dengan jumlah pekerja anak terbesar di dunia. perbedaan meragukan menjadi bangsa dengan jumlah pekerja anak terbesar di dunia. Mereka memperoleh sedikit dan berjuang untuk membuat cukup untuk makan sendiri dan keluarga mereka. Mereka tidak pergi ke sekolah, lebih dari separuh dari mereka tidak dapat mempelajari

keterampilan paling sederhana tentang keaksaraan. Kemiskinan adalah salah satu alasan utama di balik fenomena ini.

Prostitusi anak Ironisnya adalah kategori khusus yang ketat kasus pekerja anak dan menimbulkan masalah etis mengganggu lebih dari pekerja anak secara umum.

Adapun statistik pekerja anak, yaitu:

1. Terdapat 17 Juta anak-anak dalam melakukan pekerjaan India sebagai perestimasi resmi.
2. Sebuah studi menemukan bahwa anak-anak dikirim untuk bekerja dengan paksaan dan bukan oleh pilihan, kebanyakan oleh orang tua, tetapi dengan perekrut memainkan peran penting dalam mempengaruhi keputusan.
3. Ketika bekerja di luar keluarga, anak-anak dimasukkan ke dalam rata-rata 21 jam per minggu kerja.
4. 19% dari anak-anak dipekerjakan bekerja sebagai pembantu rumah tangga.
5. 90% anak yang bekerja di pedesaan India.
6. 85% dari anak-anak yang bekerja di sektor yang terorganisir.
7. Sekitar 80% dari pekerja anak terlibat dalam pekerjaan pertanian.
8. Jutaan anak-anak bekerja untuk membantu keluarga mereka karena orang dewasa tidak memiliki pekerjaan yang sesuai dan pendapatan maka penebusan sekolah dan kesempatan untuk bermain dan beristirahat.
9. Anak-anak juga bekerja karena ada permintaan untuk tenaga kerja murah. Tinggi insiden pekerja anak adalah hasil dari kejadian pengangguran yang tinggi dewasa.

10. Sejumlah besar anak bekerja hanya karena tidak ada pilihan lain karena, mereka tidak memiliki akses ke sekolah-sekolah berkualitas baik.
11. Ikatan keluarga miskin dan sering "menjual" anak-anak mereka kepada kontraktor yang menjanjikan pekerjaan yang menguntungkan di kota-kota dan anak-anak sampai akhir yang bekerja di rumah bordil, hotel dan pekerjaan rumah tangga. Banyak melarikan diri dan mencari kehidupan di jalanan.
12. Ada sekitar 2 juta anak pekerja seks komersial antara umur 5 dan 15 tahun dan sekitar 3,3 juta dolar antara 15 dan 18 tahun.
13. Mereka membentuk 40% dari total populasi pekerja seks komersial di India.
14. 80% di antaranya ditemukan dalam 5 Metro.
15. 71% dari mereka buta huruf.
16. 500.000 anak dipaksa ke dalam perdagangan ini setiap tahun.

    (http://smilefoundationindia.org/ourchildren.htm, diakses 6 juli 2010))

Pelacuran anak-anak atau pelacuran anak merupakan bentuk pelecehan seksual anak yang melibatkan eksploitasi seksual komersial anak di mana anak melakukan jasa prostitusi, untuk keuntungan finansial. Bentuk pelacuran anak di mana orang bepergian ke luar negeri untuk tujuan menghindari hukum di negara tempat tinggal mereka dikenal sebagai wisata seks anak . (http://en.wikipedia.org/wiki/Prostitution_of_children,(diakses, 20 desember 2010))

4.1.2 Penanganan Pemerintah Dalam Pekerja Seks Anak di India

Pemerintah India, secara resmi dikenal sebagai Uni Pemerintah dan juga dikenal sebagai Pemerintah Pusat, didirikan oleh Konstitusi India, dan merupakan otoritas yang mengatur suatu kesatuan 28 negara dan tujuh wilayah persatuan, secara kolektif disebut Republik India.

Pemerintahan di India dalam penanganan pekerja seks anak di India ini merupakan tanggung jawabnya dalam pekerja seks komersial anak ini, pemerintah ikut serta didalamnya. Karena pemerintah bergerak untuk memberikan perlindungan yang lebih besar bagi anak-anak bangsa, sebuah model adalah untuk diletakkan di tempat untuk memperbaiki cara kasus pekerja seks anak di India yang ditangani. Pemerintah nasional di negara-negara yang berjuang secara ekonomi telah menjadi semakin berorientasi wisata dalam pencarian mereka untuk sumber pendapatan yang menguntungkan. Pemerintah untuk menangani tegas dengan penjahat dan polisi merekomendasikan sayap terpisah untuk menangani perdagangan anak. Akhirnya, tindakan oleh pemerintah asing dapat langsung atau tidak langsung mendorong pariwisata seks anak. Pemerintah nasional di Negara-negara yang berjuang secara ekonomi telah menjadi semakin berorientasi wisata dalam pencarian mereka untuk sumber pendapatan yang menguntungkan.

4.2 Program UNICEF dalam Penanganan Pekerja Seks komersial Anak di India

Dalam membahas masalah prostitusi anak sebagai masalah yang berhubungan dengan perlindungan anak (*child protection*), dan mempertegas Hak-

hak Anak (*children rights*). Oleh karena itu program bantuan yang diberikan oleh UNICEF berkaitan erat dengan hak anak, program perlindungan anak dan hak anak, dan apa yang diberikan dan dikerjakan oleh UNICEF pada dasarnya disesuaikan dengan program yang diberikan oleh pemerintah Negara yang bersangkutan, akan tetapi secara garis besar program yang diberikan oleh UNICEF hampir sama dengan program bantuan di Negara lainnya.

4.2.1 Perlindungan Anak (*Child Protection*)

Pendekatan programatik UNICEF India untuk perlindungan anak bertujuan untuk membangun lingkungan yang protektif di mana anak-anak dapat hidup dan berkembang dalam menghormati penuh hak-hak fundamental mereka. Pendekatan ini menyebabkan program yang berlapis-lapis yang cakupannya untuk memahami dan menangani beberapa kerentanan anak-anak yang membutuhkan perlindungan khusus daripada hanya mengatasi manifestasi langsung mereka. Program Perlindungan Anak UNICEF di India berfokus terutama pada tiga bidang intervensi: pekerja anak, perdagangan anak, dan anak-anak dalam keadaan sulit.

Di bidang Pekerja Anak, proyek yang dilaksanakan di berbagai Negara-negara mengadopsi pendekatan dasarnya holistik, yang menggabungkan strategi bertujuan tidak hanya untuk penarikan anak-anak dari pekerjaan, tetapi juga untuk meningkatkan kesadaran, kepemilikan dan tindakan kolektif untuk perlindungan dan promosi Hak-hak Anak.

Strategi yang ada meliputi yaitu, Promosi pendidikan sebagai keduanya, tindakan pencegahan kunci dan komponen penting untuk rehabilitasi anak-anak

dilepaskan, mengatasi kemiskinan faktor yang berhubungan melalui promosi diri kelompok, advokasi dan mobilisasi sosial untuk penghapusan pekerja anak.

Strategi ini menyebabkan kenaikan lebih dari 47 persen dalam pendaftaran sekolah dan hadir di antara desa-desa ditargetkan oleh intervensi penghapusan pekerja anak yang sedang berlangsung UNICEF. Lebih dari 120 alternatif belajar telah didirikan dalam rangka untuk memfasilitasi pengurus utamaan anak sekolah ke pendidikan formal dan melalui mereka lebih dari 24.000 anak-anak telah dapat kembali ke sekolah. Selain itu, lebih dari 1000 Grup telah ditetapkan dan mereka sekarang memainkan peran penting dalam mengurangi hutang di kalangan keluarga miskin di pedesaan. Pemberdayaan wanita juga menunjukkan menjadi instrumental untuk kesejahteraan anak secara keseluruhan.

Dengan dukungan UNICEF misalnya, 50 persen dari desa sasaran telah mengadopsi tiga praktik kunci ramah, yaitu suatu cakupan imunisasi lebih dari 80 persen, dengan tingkat pendaftaran sekolah lebih dari 90 persen dan peningkatan yang masuk akal dalam usia perkawinan. Di bidang perdagangan anak, UNICEF mendukung Pemerintah India dengan strategi ganda bertujuan untuk memperkuat mekanisme penyelamatan dan mengurangi kerentanan anak di waktu yang sama untuk perdagangan melalui fokus khusus pada tindakan pencegahan.

Strategi Komunikasi Nasional pada perdagangan anak telah dikembangkan dan sekarang sedang dilaksanakan di tingkat masyarakat melalui Kantor-kantor Negara UNICEF. Manual telah dikembangkan untuk pekerja sosial, peradilan, dan konselor bekerja pada isu-isu perdagangan anak untuk memungkinkan proses penyelamatan dan rehabilitasi yang merupakan kepentingan terbaik bagi anak.

Sebagai bagian dari upaya untuk merumuskan strategi dan perundang-undangan tentang isu-isu yang berkaitan dengan perlindungan anak, UNICEF juga mendukung Departemen Perempuan dan Anak Pembangunan, Pemerintah India, untuk melakukan studi tingkat nasional pada anak yang terkena dampak kekerasan dan untuk melakukan regional dan nasional konsultasi tentang perkawinan anak-anak dan untuk mengadakan dialog tentang Pelanggaran Terhadap Anak.

Dalam upaya untuk meningkatkan pelaksanaan Sistem Peradilan di Negara UNICEF juga mendukung pemerintah dengan pengembangan bahan pelatihan bagi Peradilan dan pejabat lainnya berbagai sistem seperti anggota komite kesejahteraan anak, polisi dan perawatan di berbagai lembaga di bawah Undang-Undang. UNICEF juga bekerjasama dengan Departemen Perempuan dan Anak Pembangunan pada penciptaan sebuah website untuk hilang Anak-anak untuk memfasilitasi pelacakan dan reintegrasi anak-anak hilang. (http://www.unicef.org/india/child_protection.html, (diakses 26 November 2010))

Pendekatan ini berbasis Hak Asasi Manusia, dan menekankan pencegahan serta akuntabilitas pemerintah. Perlindungan lingkungan yang terletak dalam 2 pilar strategis: memperkuat sistem nasional dan perubahan sosial, yang menerjemahkan ke dalam 8 strategi utama berikut:

1. komitmen Pemerintah untuk memenuhi Hak-hak Perlindungan: termasuk kebijakan kesejahteraan sosial, anggaran yang memadai, pengakuan publik dan ratifikasi instrumen internasional.
2. Perundang-undangan dan penegakan hukum: mencakup kerangka kerja legislatif yang memadai, pelaksanaan secara konsisten, akuntabilitas dan kurangnya impunitas.
3. Sikap, tradisi, kebiasaan, perilaku dan praktek: termasuk norma-norma sosial dan tradisi yang mengutuk praktek-praktek merugikan dan mendukung mereka yang protektif.

4. Buka diskusi, termasuk keterlibatan media dan masyarakat sipil: mengakui keheningan sebagai penghalang utama untuk mengamankan komitmen pemerintah, mendukung praktek-praktek yang positif dan memastikan keterlibatan anak-anak dan keluarga.
5. kehidupan anak-anak keterampilan, pengetahuan dan partisipasi: termasuk anak-anak, perempuan dan anak laki-laki, sebagai aktor dalam perlindungan mereka sendiri melalui penggunaan pengetahuan tentang perlindungan hak-hak mereka dan cara-cara menghindari dan menanggapi risiko.
6. Kapasitas mereka yang kontak dengan anak: mencakup pengetahuan, motivasi dan dukungan yang diperlukan oleh keluarga dan oleh anggota masyarakat, guru, kesehatan dan pekerja sosial dan polisi, untuk melindungi anak-anak.
7. Dasar dan Target Pelayanan: termasuk pelayanan sosial dasar, kesehatan dan pendidikan anak-anak yang memiliki hak, tanpa diskriminasi, dan juga jasa-jasa tertentu yang membantu untuk mencegah kekerasan dan eksploitasi, dan menyediakan perawatan, dukungan dan bantuan reintegrasi dalam situasi kekerasan, pelecehan dan pemisahan.
8. Monitoring dan Pengawasan: mencakup sistem pemantauan yang efektif seperti pengumpulan data, dan pengawasan dari tren dan tanggapan. (http://www.unicef.org/india/reallives_5837.htm, (diakses 13 agustus 2010))

Tujuan dari program ini adalah untuk mencegah kekerasan terhadap anak dan untuk memperkuat layanan perlindungan bagi anak-anak dalam situasi yang rentan. Mendukung pelaksanaan Pemerintah yang baru diluncurkan Anak India Terpadu Skema Perlindungan (ICPs) untuk menciptakan lingkungan yang protektif bagi anak-anak melalui perbaikan dan perluasan pelayanan untuk anak-anak yang membutuhkan perawatan dan perlindungan dan anak yang berkonflik dengan hukum di bawah ketentuan dari Peradilan Anak Undang-Undang dan peraturan terkait. UNICEF juga mendukung pemerintah dalam rangka memberikan kontribusi pada pengurangan pekerja anak dengan memperkuat struktur perlindungan anak untuk cukup melindungi anak-anak terhadap eksploitasi dan pelecehan, peningkatan kualitas pendidikan untuk meningkatkan

pendaftaran dan retensi, meningkatkan kesadaran dan pemberdayaan keluarga dan masyarakat sehingga mereka mengambil tindakan kolektif terhadap pekerja anak, dan pengecualian pengalamatan keluarga rentan terhadap penyediaan layanan dan skema perlindungan sosial. Di bidang perdagangan anak, UNICEF mendukung Pemerintah India dengan strategi ganda bertujuan untuk memperkuat mekanisme penyelamatan dan mengurangi kerentanan anak di waktu yang sama untuk perdagangan melalui fokus khusus pada tindakan pencegahan. Untuk tujuan ini, Strategi Komunikasi Nasional pada perdagangan anak telah dikembangkan dan sekarang sedang dilaksanakan di tingkat masyarakat melalui kantor-kantor Negara UNICEF. Manual telah dikembangkan untuk pekerja sosial, peradilan, dan konselor bekerja pada isu-isu perdagangan anak untuk memungkinkan proses penyelamatan dan rehabilitasi yang merupakan kepentingan terbaik bagi anak.

Sebagai bagian dari upaya untuk merumuskan strategi dan perundang-undangan tentang isu-isu yang berkaitan dengan perlindungan anak, UNICEF juga mendukung Departemen Perempuan dan Anak Pembangunan, Pemerintah India, untuk melakukan studi tingkat nasional pada anak yang terkena dampak kekerasan dan untuk melakukan regional dan nasional konsultasi tentang perkawinan anak-anak dan untuk mengadakan dialog tentang Pelanggaran Terhadap Anak. Dalam program ini, peran UNICEF adalah sebagai pemberi informasi aktual mengenai jumlah kasus-kasus yang telah terjadi terhadap kaum anak-anak dan wanita yang dipekerjakan dan dijual sebagai tenaga prostitusi.

Dalam upaya untuk meningkatkan pelaksanaan Sistem Peradilan di Negara UNICEF juga mendukung pemerintah dengan pengembangan bahan pelatihan

bagi Peradilan dan pejabat lainnya berbagai sistem seperti anggota komite kesejahteraan anak, polisi dan perawatan di berbagai lembaga di bawah Undang-Undang. UNICEF juga bekerjasama dengan Departemen Perempuan dan Anak Pembangunan pada penciptaan sebuah website untuk Hilang Anak-anak untuk memfasilitasi pelacakan dan reintegrasi anak-anak hilang.

UNICEF juga bekerja sama dengan Departemen Perempuan dan Anak Pembangunan dan pemangku kepentingan lainnya untuk mengurangi timbulnya perkawinan anak-anak, memastikan pelaksanaan Larangan Anak Undang-Undang Perkawinan dan menyikapi norma-norma sosial yang menggarisbawahi praktek ini. Daerah-daerah lain dimana UNICEF mendukung Pemerintah India dan mitra lainnya tentang pencegahan perdagangan anak dan rehabilitasi, kembali, dan integrasi anak-anak yang diperdagangkan, perjuangan melawan hukuman badan, promosi pendaftaran kelahiran, dan memperkuat basis pengetahuan pada situasi anak-anak dan isu-isu perlindungan anak di Negeri ini. (http://www.unicef.org/india/reallives_5837.htm, (diakses 13 agustus 2010))

4.2.2 Hak-Hak Anak (*Children Rights*)

Dengan pertimbangan bahwa memperkerjakan seorang anak yang masih berada dibawah batas usia minimum bekerja dapat diartikan sebagai salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia. Dimana anak yang masih dibawah usia bekerja, belum dapat memenuhi persyaratan untuk menjadi seorang pekerja baik secara fisik maupun secara moral.

Anak pada umurnya, baik laki-laki maupun perempuan dianggap belum mampu memberikan persetujuan secara sadar terhadap berbagai hal yang

dianggap membutuhkan kematangan fisik, mental, sosial, dan moral bagi seseorang yang bisa menentukan pilihannya. Mereka seharusnya belajar daripada bekerja, UNICEF mempengaruhi berkurangnya anak terlantar dan memperbaiki tingkat pendidikan yang lebih baik dengan lebih banyak anak yang bersekolah daripada bekerja. UNICEF juga sangat mendukung adanya *The Convention on The Rights of The Child* tersebut. Sebagai wujud dukungannya, saat ini UNICEF berusaha untuk mengurangi penderitaan anak-anak khususnya pada keadaan-keadaan darurat, dan anak-anak dimanapun yang terancam, karena tidak ada seorang anak pun yang boleh mendapatkan penganiyaan, kekerasaan, ataupun eksploitasi. UNICEF pun berusaha mewujudkan keadilaan bagi anak-anak yang terdiskriminasi, khususnya anak-anak perempuan, karena itulah UNICEF memerlukan bantuan semua pihak dalam menciptakan lingkungan yang aman bagi anak-anak.

Misi UNICEF untuk mengadvokasi perlindungan hak-hak anak, untuk membantu memenuhi kebutuhan dasar mereka dan untuk memperluas kesempatan mereka untuk mencapai potensi mereka sepenuhnya. UNICEF dipandu dalam melakukan ini dengan ketentuan dan prinsip-prinsip Konvensi Hak Anak. Dibangun pada sistem hukum bervariasi dan tradisi budaya, Konvensi adalah universal disepakati serangkaian standar *non-negotiable* dan kewajiban. Ini dasar standar juga disebut hak asasi manusia-set minimum hak dan kebebasan yang harus dihormati oleh pemerintah.

Mereka didirikan pada penghargaan martabat dan nilai setiap individu, terlepas dari ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pendapat, asal-usul,

kekayaan, status kelahiran atau kemampuan dan karena itu berlaku untuk setiap manusia di mana-mana. Dengan hak-hak ini datang kewajiban pada kedua pemerintah dan individu untuk tidak melanggar hak-hak sejajar orang lain. Standar ini keduanya saling tergantung dan tak terpisahkan, kami tidak bisa menjamin beberapa hak tanpa atau dengan mengorbankan hak-hak lainnya. (http://www.unicef.org/crc/, (diakses, 22 januari 2011))

4.3 Kendala yang dihadapi UNICEF Dalam Penanganan Pekerja Seks Anak di India

India memiliki beberapa kendala dalam mengatasi permasalahan mengenai prostitusi anak. Dimana hal tersebut terdapat terjadi karena berbenturan dengan budaya yang telah tercipta sepanjang perjalanan Negara India dalam membangun perekonomian Negaranya, perekonomian Negara India yang beralih kepada sektor pariwisata, dan hukum-hukum yang disahkan oleh pemerintah India mengenai adanya prostitusi anak. UNICEF mendukung pengembangan dan pelaksanaan kerangka hukum yang menjamin Perlindungan Hak-hak Anak. Sebagai bagian penting dari sebuah bangunan Perlindungan Lingkungan, UNICEF bekerjasama dengan pemerintah untuk memastikan bahwa kerangka hukum yang ditegakkan dan dibuat menjadi kenyataan bagi anak-anak yang disediakan di bawah standar internasional setiap masalah di bawah ini merupakan komitmen pemerintah nasional untuk Perlindungan Anak. Lalu Lintas bermoral (Pencegahan) UU yang disahkan oleh kedua majelis parlemen Agustus lalu mulai berlaku dari hari Senin 26 Januari 1987.

Berdasarkan tindakan penahanan telah diubah dari seorang wanita untuk tujuan prostitusi adalah hukuman dengan minimal tujuh tahun penjara dan maksimum hukuman penjara seumur hidup yang ketat pula akan diberikan kepada anak-anak pengadaan untuk prostitusi. Definisi pelacur itu sendiri telah diubah untuk memasukkan orang-orang dari kedua jenis kelamin. Sebelumnya itu termasuk anak perempuan dan perempuan saja. Perubahan tersebut memperhitungkan ancaman tumbuh prostitusi laki-laki terutama yang melibatkan anak laki-laki muda. Berdasarkan undang-undang baru terdapat tiga kategori korban anak-anak di bawah umur dan jurusan. Anak-anak adalah mereka sampai 16 tahun dan anak-anak adalah mereka antara 16 sampai 18 Tahun dan jurusan adalah mereka diatas 18 Tahun. Tindakan sebelumnya diakui hanya perempuan dan anak perempuan - perempuan menjadi salah satu yang telah menyelesaikan 21 tahun. Hukuman untuk pelanggaran yang dilakukan terhadap kategori ini berbeda dalam tingkat keparahan Pelanggaran Komitmen terhadap anak dan anak-anak akan ditangani dengan lebih berat daripada terhadap jurusan.

4.3.1 Tingkat Perekonomian

Ekonomi India adalah terbesar kesebelas ekonomi di dunia dengan PDB nominal dan keempat terbesar oleh paritas daya beli (PPP). Setelah reformasi ekonomi yang kuat dari sosialis terinspirasi ekonomi dari pasca kemerdekaan bangsa India, Negara mulai mengembangkan pertumbuhan ekonomi yang serba cepat, sebagai pasar bebas kegiatan dimulai pada tahun 1990 untuk kompetisi internasional dan investasi asing. India merupakan kekuatan ekonomi yang muncul dengan sebuah kolam yang sangat besar dari sumber daya manusia dan

alam, dan kolam besar semakin profesional terampil. Ekonomi memprediksi bahwa pada tahun 2020, India akan menjadi antara ekonomi-ekonomi utama dunia.

India berada di bawah demokratis sosial berdasarkan kebijakan 1947-1991. Perekonomian ditandai dengan peraturan yang ekstensif, proteksionisme, kepemilikan publik, korupsi meresap dan pertumbuhan yang lambat. Sejak tahun 1991, liberalisasi ekonomi yang berkelanjutan telah bergerak menuju Negara berbasis ekonomi pasar . Sebuah kebangkitan reformasi ekonomi dan kebijakan ekonomi yang lebih baik di tahun 2000-an dipercepat India laju pertumbuhan ekonomi. (http://en.wikipedia.org/wiki/Economy_of_India, (diakses 6 juli 2010))

Pada tingkat kondisi sosial ekonomi dalam perekonomian India, khususnya di India cadangan ekonomi, pertumbuhan penduduk, demografi ekonomi India membutuhkan tingginya tingkat pertumbuhan lapangan kerja dan pendapatan hanya untuk mempertahankan tingkat kerja yang ada perkiraan. Statistik Kanada bahwa penduduk India terdaftar di Saskatchewan akan tumbuh sebesar 13% selama dekade 1986-1996, jumlah tenaga kerja terdaftar dari India kekuatan usia (15 tahun ke atas) akan meningkatkan oleh hampir 30% antara tahun 1986 dan 1996 dari sekitar 35.000 menjadi sekitar 45.000. Hal ini menimbulkan tantangan besar bagi upaya pembangunan. (http://www.sicc.sk.ca/saskindian/a89apr08.htm,(diakses 6 juli 2010))

4.3.2 Tingkat Pendidikan

Pendidikan di India memiliki sejarah yang membentang kembali ke pusat kota kuno belajar di Taxila dan Nalanda. Universitas Nalanda adalah universitas tertua sistem pendidikan di dunia. Pendidikan di India berada di bawah kendali baik Pemerintah Uni dan Negara, dengan beberapa tanggung jawab berbaring dengan Uni dan Negara-negara yang memiliki otonomi untuk orang lain. India telah membuat kemajuan besar dalam meningkatkan pendidikan dasar tingkat kehadiran dan memperluas keaksaraan untuk sekitar dua pertiga dari penduduk. Sistem pendidikan ditingkatkan India sering disebut sebagai salah satu kontributor utama terhadap peningkatan ekonomi di India. Banyak kemajuan di bidang pendidikan telah diakui lembaga partikelir. Pasar pendidikan swasta di India diperkirakan bernilai $ 40 miliar 2008 dan akan meningkat menjadi $ 68 milyar pada 2012. Namun, India terus menghadapi tantangan. Meskipun investasi tumbuh dalam pendidikan, 35% dari populasi buta huruf dan hanya 15% dari siswa mencapai sekolah tinggi. Banyak kemajuan di bidang pendidikan telah diakui lembaga partikelir. Pasar pendidikan swasta di India diperkirakan bernilai $ 40 miliar 2008 dan akan meningkat menjadi $ 68 milyar pada 2012. Namun, India terus menghadapi tantangan. Meskipun investasi tumbuh dalam pendidikan, 35% dari populasi buta huruf dan hanya 15% dari siswa mencapai sekolah tinggi.

Pemerintah India meletakkan penekanan pada pendidikan dasar sampai dengan usia empat belas tahun (disebut sebagai Pendidikan Dasar di India). Pemerintah India juga melarang pekerja anak dalam rangka untuk memastikan bahwa anak-anak tidak memasukkan kondisi kerja yang tidak aman. Namun, baik

pendidikan gratis dan larangan pekerja anak sulit untuk menegakkan karena kesenjangan ekonomi dan kondisi sosial. 80% dari semua sekolah diakui pada Tahap dasar adalah pemerintah menjalankan atau didukung, sehingga operator terbesar pendidikan di Tanah Air. Namun, karena kekurangan sumber daya dan kurangnya kemauan politik, sistem ini menderita dari kesenjangan yang besar termasuk rasio guru murid tinggi, kurangnya infrastruktur dan rendahnya tingkat pelatihan guru. Ada beberapa upaya untuk meningkatkan kualitas dibuat oleh pemerintah. **Adanya beberapa fakta tentang** Pendidikan **yaitu:**

1. Kurang dari separuh anak-anak India antara umur 6 dan 14 pergi ke sekolah.
2. Sedikit lebih dari sepertiga dari semua anak-anak yang mendaftar di kelas satu sampai delapan kelas.
3. Sedikitnya 35 juta anak-anak yang berumur 6 - 14 tahun tidak bersekolah.
4. 53% anak perempuan di kelompok usia 5 sampai 9 tahun buta huruf.
5. Di India, hanya 53% dari tempat tinggal memiliki sekolah dasar.
6. Di India, hanya 20% dari tempat tinggal memiliki sekolah menengah.
7. Pada rata-rata sekolah dasar atas adalah 3 km di 22% dari wilayah di bawah pemukiman.
8. Pada hampir 60% dari sekolah, ada kurang dari dua guru untuk mengajar Kelas I sampai V.
9. Pada rata-rata, terdapat kurang dari tiga guru per-sekolah dasar. Mereka harus mengelola kelas dari I sampai V setiap hari.

10. Biaya tinggi swasta pendidikan dan harus bekerja untuk menghidupi keluarga mereka dan bunga kecil dalam studi adalah alasan yang diberikan oleh 3 di setiap empat putus sebagai alasan mereka meninggalkan.
11. Drop out meningkatkan tingkat mengkhawatirkan di kelas III ke V,% 50 untuk anak laki-laki, 58% untuk perempuan.
12. 1 di 40, sekolah dasar di India dilakukan di ruang terbuka atau tenda.
13. Di Andhra Pradesh (India Selatan), 52 sekolah dasar atas yang beroperasi tanpa bangunan pada tahun 2002, sedangkan pada tahun 1993, tidak ada
14. Dalam Maharashtra (India Barat), ada 10 sekolah beroperasi tanpa sebuah bangunan di tahun 1993, ini telah naik menjadi 33 pada tahun 2002.
15. Lebih dari 50 persen anak perempuan gagal untuk mendaftar di sekolah, orang-orang yang cenderung putus pada usia 12.
16. 50% anak usia 6-18 India tidak pergi ke sekolah.

(http://en.wikipedia.org/wiki/Education_in_india, (diakses 06 juli 2010))

4.4 Tingkat keberhasilan Program UNICEF Dalam *child protection* dan *children's rights* Dalam Penanganan Pekerja Seks Komersial Anak di India

Banyak survei telah dilakukan untuk mengetahui sejauh mana pekerja seks anak 70% dari perempuan yang dipaksa menjadi pelacur dan 20% di antaranya anak pelacur. UNICEF berupaya untuk mencari suatu keteraturan dengan mencari pembelaan dan dukungan terhadap anak-anak untuk mendapatkan Perlindungan

anak dan Hak-hak Anak. Sebuah survei yang dilakukan oleh *Indian Health Organization* dari kawasan lampu merah menunjukkan Bombay:

1. 20% dari satu pelacur lakh adalah anak-anak.
2. 25% dari anak pelacur telah diculik dan dijual.
3. 6% telah diperkosa dan dijual.
4. 8% telah berhasil dijual oleh nenek moyang mereka setelah memaksa mereka ke dalam hubungan sumbang.
5. 2 anak perempuan kecil lakh antara usia 9-20 Tahun dibawa setiap tahun dari Nepal ke India dan 20.000 dari mereka berada di bordil Bombay.
6. 15% sampai 18% adalah remaja antara 13 thn dan 18 thn.
7. 15% dari perempuan dalam prostitusi telah dijual oleh suami mereka
8. Dari 200 m menderita penyakit menular seksual di 50 m dunia sendirian berada di India.
9. 15% dari mereka adalah devdasis.

(http://www.pucl.org/from-archives/Child/prostitution.htm, (diakses 06 juli 2010))

4.4.1 Perlindungan Anak (*Child protection*)

Pada program *child protection* UNICEF memberikan bantuan berupa penyuluhan baik di desa maupun di sekolah-sekolah tentang kekerasan yang terjadi terhadap anak yang dijadikan komoditas seks, Pelanggaran hak anak untuk perlindungan terjadi di setiap negara dan besar, di bawah yang diakui dan hambatan kurang dilaporkan untuk kelangsungan hidup anak dan pengembangan, selain menjadi pelanggaran Hak Asasi Manusia. UNICEF program perlindungan

bertujuan untuk mencegah dan menangani kekerasan eksploitasi dan pelecehan terhadap anak.

Child protection dinyatakan tidak berperan dikarenakan fokus utamanya dalam menangani pekerja anak yaitu dengan menghentikan adanya pekerja anak tidak berhasil dikarenakan pemerintah yang kurang mendukung untuk menghentikan atau membuat aturan yang lebih ketat tentang prostitusi, walaupun dalam *children rights* telah dibuat ketetapan tentang pembatasan umur yang ada dalam pekerja anak. Namun yang peran UNICEF dalam melindungi anak-anak tidak dapat dikatakan memiliki peranan yang sangat besar, dikarenakan selama adanya bar dan klub malam yang diperbolehkan untuk melakukan prostitusi dan tempat-tempat lainnya maka akan ada anak-anak yang dipekerjakan sebagai pekerja seks anak yang dibuktikan dengan kenaikan angka pekerja anak, oleh karena itu program *child protection* dinyatakan kurang atau tidak berhasil dikarenakan fokus utamanya untuk menghapuskan pekerja anak tidak berhasil dan tidak mengalami penurunan. Hak untuk mendapatkan perlindungan (*protection*), yang meliputi perlindungan dari diskriminasi, tindak kekerasan dan keterlantaran bagi anak-anak yang tidak mempunyai keluarga dan bagi anak-anak pengungsi.

4.4.2 Hak-Hak Anak (*Child Rights*)

Children rights merupakan sebuah program yang dilakukan oleh UNICEF untuk mengupayakan agar anak-anak mendapatkan kehidupan layak dengan fokus utama adanya regulasi mengenai pekerja anak dengan melarang adanya pekerja anak yang berusia dibawah 18 tahun untuk bekerja, UNICEF melihat bahwa anak-anak yang berada dibawah usia 18 tahun belum memiliki kematangan pemikiran

untuk membuat keputusan mencari pekerjaan yang layak. Sehingga *children rights* melihat bahwa adanya anak yang bekerja pada usia 18 tahun hanya menjadikan anak sebuah komoditi atau dalam hal lain hanya mengeksploitasi anak-anak tersebut.

Hak–hak Anak yang ada dalam *children rights* adalah untuk mendapatkan kehidupan yang layak dengan fokus utama dalam permasalahan ini adalah dengan adanya pembatasan pekerja anak yaitu dibawah 18 tahun untuk tidak dipekerjakan, sehingga program yang dilakukan oleh UNICEF dalam *children rights* ini dapat dikatakan berperan, dikarenakan UNICEF tidak hanya melakukan tugasnya sesuai dengan fungsi dan kedudukannya sebagai sebuah organisasi anak internasional namun juga fokus utamanya dalam program ini telah tercapai dengan adanya implementasi dari pemerintahan India tentang pembatasan umur anak yang bekerja.

Pelaksanaan konvensi ini diawasi oleh Komite Hak-Hak Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa yang anggota-anggotanya terdiri dari berbagai Negara di seluruh dunia. Setiap tahun, Komite ini memberikan laporan kepada Komite Ketiga Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa yang juga akan mendengar pernyataan ketua Komite Hak-Hak Anak dan mengadopsi resolusi mengenai Hak-Hak Anak. Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa mengadopsi konvensi ini dan terbuka untuk penandatangan pada tanggal 20 November 1989 (pada peringatan 30 tahun Deklarasi Hak-Hak Asasi Anak) Pemerintah Negara yang telah meratifikasi konvensi ini diharuskan untuk melaporkan dan hadir di hadapan Komite Hak-Hak Anak secara berkala untuk

mengevaluasi kemajuan-kemajuan yang dicapai dalam mengimplementasikan konvensi ini dan status hak-hak anak dalam Negara tersebut. (http://id.wikipedia.org/wiki/Konvensi_Hak-Hak_Anak, diakses 06 juli 2010))

4.5 Analisis UNICEF Berperan Melalui Program *Child Protection* dan *Children Rights* Dapat Mengurangi Pekerja Seks Komersial Anak di India

Bahwa *child protection* yaitu program yang dijalankan UNICEF dalam melindungi anak-anak mempunyai akses terhadap pelayanan kesehatan dan menikmati standar hidup yang layak pada anak-anak yang mengatasi masalah eksploitasi seks komersial terhadap anak di India. UNICEF *Child Protection* program di fokus India sebagian besar atas tiga bidang intervensi: kerja anak, anak memperdagangkan, dan anak di situasi sulit. Di bidang Kerja Anak, proyek yang dilaksanakan di berbagai Negara bagian Negara mengambil pendekatan yang holistis pada hakekatnya, menggabungkan strategi yang diarahkan tak hanya sampai penarikan anak dari kerja, tetapi juga untuk meningkatkan *cummunities* kesadaran, kemilikan dan tindakan kolektif untuk perlindungan dan promosi hak-hak anak. Di bidang anak memperdagangkan, UNICEF India mendukung Pemerintah dengan dua kali lipat strategi bermaksud memperkuat mekanisme penyelamat dan mengurangi sekaligus keringkihan memperdagangkan lewat fokus istimewa atas tindakan pencegahan. Sebagian kecil kekerasan terhadap anak membawa kematian, tetapi paling sering kekerasan bahkan tidak meninggalkan bekas terlihat. Hal ini dapat mempengaruhi kesehatan anak-anak fisik dan mental,

merusak kemampuan mereka untuk belajar dan bersosialisasi. Kekerasan juga dapat memiliki implikasi berat bagi perkembangan anak-anak. Kekerasan terhadap anak terjadi ketika pengalaman anak membahayakan, biasanya sebagai hasil dari kegagalan pada bagian dari orang tua atau pengasuh untuk memastikan standar yang memadai perawatan dan perlindungan.

Child Rights merupakan sebuah program yang dilakukan oleh UNICEF untuk mengupayakan agar anak-anak mendapatkan kehidupan layak dengan fokus utama adanya regulasi mengenai pekerja anak dengan melarang adanya pekerja anak yang berusia dibawah 18 tahun untuk bekerja, UNICEF melihat bahwa anak-anak yang berada dibawah usia 18 tahun belum memiliki kematangan pemikiran untuk membuat keputusan mencari pekerjaan yang layak. Sehingga *children rights* melihat bahwa adanya anak yang bekerja pada usia 18 tahun hanya menjadikan anak sebuah komoditi atau dalam hal lain hanya mengeksploitasi anak-anak tersebut.

Hak–hak Anak yang ada dalam *children rights* adalah untuk mendapatkan kehidupan yang layak dengan fokus utama dalam permasalahan ini adalah dengan adanya pembatasan pekerja anak yaitu dibawah 18 tahun untuk tidak dipekerjakan, sehingga program yang dilakukan oleh UNICEF dalam *children rights* ini dapat dikatakan berperan, dikarenakan UNICEF tidak hanya melakukan tugasnya sesuai dengan fungsi dan kedudukannya sebagai sebuah organisasi anak internasional namun juga fokus utamanya dalam program ini telah tercapai dengan adanya implementasi dari pemerintahan India tentang pembatasan umur anak yang bekerja.